

Analisis Psikologis terhadap Perilaku Hakim dalam Mengambil Keputusan

Rian Prayudi Saputra¹, Khairul Hidayatullah², Abdurrahman³, Alfia Roza⁴, Fabrizio⁵, Resky⁶

^{1,2,3,4,5,6}Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar, Riau
Rianprayudi@gmail.com

Abstract

This article aims to provide an in-depth understanding of the psychological challenges judges face in decision making, as well as their impact on individuals, society and the legal system. The method used is a literature review that analyzes theories, research and related references to evaluate cognitive, emotional and social factors that influence judge behavior. The discussion shows that cognitive bias, emotional stress, and external influences can influence a judge's objectivity, while experience and education play an important role in making fair decisions. Judges' decisions have significant implications, from changing the fate of individuals to strengthening or undermining public trust in the legal system. In conclusion, wise, professional decision making, and based on thorough analysis is necessary to maintain judicial integrity and social stability.

Keywords: Psychology, Haki, Behavior, Decisions.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan psikologis yang dihadapi hakim dalam pengambilan keputusan, serta dampaknya terhadap individu, masyarakat, dan sistem hukum. Metode yang digunakan adalah kajian literatur yang menganalisis teori, penelitian, dan referensi terkait untuk mengevaluasi faktor kognitif, emosional, dan sosial yang memengaruhi perilaku hakim. Pembahasan menunjukkan bahwa bias kognitif, tekanan emosional, dan pengaruh eksternal dapat memengaruhi objektivitas hakim, sementara pengalaman dan pendidikan berperan penting dalam pengambilan keputusan yang adil. Keputusan hakim memiliki implikasi signifikan, mulai dari mengubah nasib individu hingga memperkuat atau merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kesimpulannya, pengambilan keputusan yang bijaksana, profesional, dan berbasis pada analisis menyeluruh sangat diperlukan untuk menjaga integritas peradilan dan stabilitas sosial.

Kata Kunci: Psikologi, Perilaku Haki, Keputusan.

Copyright (c) 2025 Rian Prayudi Saputra, Khairul Hidayatullah, Abdurrahman, Alfia Roza, Fabrizio, Resky

✉ Corresponding author: Rian Prayudi Saputra

Email Address: Rianprayudi@gmail.com (Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kab. Kampar, Riau)

Received 16 January 2025, Accepted 23 January 2025, Published 30 January 2025

PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan, hakim memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan nasib individu dan keadilan masyarakat. Keputusan yang diambil oleh hakim tidak hanya berdampak pada terdakwa, tetapi juga mencerminkan integritas dan kredibilitas sistem hukum secara keseluruhan (Eugenia et al., 2024). Proses pengambilan keputusan hakim harus dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ada, serta memperhatikan aspek psikologis yang mungkin mempengaruhi penilaian mereka. Oleh karena itu, hakim harus memiliki kemampuan analisis yang mendalam serta pemahaman yang baik terhadap dinamika sosial dan hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil secara moral. Dengan demikian, hakim menjadi pilar utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan (Azizah et al., 2023).

Psikologi hukum menjadi bidang yang semakin relevan dalam memahami perilaku hakim.

Proses pengambilan keputusan tidak hanya melibatkan logika dan hukum, tetapi juga faktor-faktor psikologis yang dapat memengaruhi bagaimana hakim menilai bukti, mendengarkan kesaksian, dan mengambil keputusan akhir (Afrizal, 2022). Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana aspek kognitif dan emosional dari hakim dapat berpengaruh terhadap hasil persidangan. Misalnya, bias kognitif atau prasangka tertentu dapat secara tidak sadar memengaruhi penilaian hakim terhadap kredibilitas saksi atau bukti (Afrizal, 2022). Pemahaman yang lebih dalam tentang psikologi hukum juga membantu mencegah kemungkinan terjadinya ketidakadilan akibat keputusan yang kurang obyektif. Dengan pendekatan ini, hakim dapat membuat keputusan yang lebih akurat dan adil.

Pengambilan keputusan dalam ruang sidang sering kali melibatkan interaksi antara berbagai pihak, seperti jaksa, pengacara, saksi, dan terdakwa (Khoiri, 2020). Dinamika sosial ini menciptakan lingkungan yang kompleks di mana hakim harus berfungsi. Interaksi ini bukan hanya berdampak pada keputusan yang diambil, tetapi juga pada persepsi hakim terhadap keadilan dan kebenaran, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Tekanan dari opini publik atau media sering kali menambah tantangan bagi hakim dalam menjaga netralitas (Salma, 2018). Selain itu, faktor-faktor seperti penampilan fisik atau cara bicara saksi dapat memengaruhi persepsi hakim, meskipun tidak selalu relevan dengan isi kesaksian. Oleh karena itu, hakim harus mampu memisahkan elemen-elemen yang tidak relevan agar dapat fokus pada fakta-fakta yang objektif (Choldah, 2023).

Hakim juga harus mampu menjaga netralitas dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan (Syam & Lowoleba, 2023). Tekanan ini bisa berasal dari opini publik, media, atau bahkan dari institusi hukum itu sendiri, yang dapat memengaruhi persepsi hakim terhadap suatu kasus. Dalam situasi tertentu, bias tidak disadari (*unconscious bias*) dapat memengaruhi cara hakim mengevaluasi bukti atau kredibilitas saksi. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk secara aktif menyadari dan mengelola bias tersebut agar tidak memengaruhi keadilan keputusan. Pelatihan dalam psikologi hukum dan pemahaman tentang bias kognitif dapat membantu hakim meningkatkan kualitas keputusan mereka. Hal ini juga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Tekanan emosional yang dihadapi hakim dalam menangani kasus-kasus yang sensitif dan kompleks dapat menjadi tantangan besar. Emosi yang tidak terkendali, seperti empati berlebihan atau rasa marah, dapat mengaburkan objektivitas dalam menilai fakta. Pengelolaan emosi yang baik menjadi keterampilan penting yang harus dimiliki hakim agar tetap fokus pada prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Dalam beberapa kasus, dukungan psikologis untuk hakim yang menghadapi tekanan emosional tinggi dapat menjadi solusi yang efektif. Selain itu, penting bagi hakim untuk menjaga kesehatan mental mereka agar dapat membuat keputusan yang jernih. Upaya ini tidak hanya melindungi individu yang terlibat dalam kasus, tetapi juga menjaga reputasi lembaga peradilan (Mulkan, 2021).

Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi hakim dalam menjalankan tugas mereka, terutama dari aspek

psikologis dan emosional. Dengan mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi proses pengambilan keputusan, diharapkan pembaca dapat menyadari pentingnya peran hakim dalam menjaga keadilan dan integritas hukum. Kesadaran akan tantangan ini tidak hanya bermanfaat bagi para hakim, tetapi juga bagi masyarakat luas yang bergantung pada sistem peradilan yang adil dan terpercaya. Dengan demikian, artikel ini menjadi upaya untuk mendukung perbaikan sistem hukum yang lebih humanis dan berkelanjutan.

METODE

Artikel ini merupakan kajian literatur atau *literature review*. Kajian literatur adalah proses analisis terhadap teori, hasil penelitian, dan referensi lain yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Kajian ini berisi ringkasan dan evaluasi penulis terhadap berbagai sumber referensi (seperti artikel, buku, dan informasi dari internet) yang terkait dengan topik yang dibahas. Proses studi literatur melibatkan kegiatan membaca, mendokumentasikan, dan mencernakan materi penelitian. Peneliti memilih metode ini karena kajian literatur membantu dalam menganalisis, mengevaluasi, serta merangkum penelitian-penelitian sebelumnya terkait topik yang telah dipilih. Pendekatan ini bermanfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu topik.

Penulis memilih metode *literature review* karena memungkinkan pengumpulan, penilaian, dan analisis data dari berbagai sumber yang sudah tersedia, seperti artikel jurnal, buku, tesis, dan laporan penelitian sebelumnya. Dengan metode ini, peneliti dapat menggunakan pengetahuan yang telah ada untuk mendalami topik tertentu, meninjau kemajuan di bidang terkait, mengevaluasi metode penelitian yang telah diterapkan, dan mengidentifikasi area yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti menghemat waktu dan biaya dalam mengumpulkan data karena lebih berfokus pada analisis dan sintesis informasi yang sudah tersedia.

HASIL DAN DISKUSI

Pemahaman Dasar tentang Pengambilan Keputusan Hakim

Pengambilan keputusan merupakan aspek krusial bagi hakim dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa (Siregar & Tanjung, 2024). Dalam proses ini, hakim harus mampu menganalisis dan mengolah berbagai data yang diperoleh selama persidangan, termasuk alat bukti, keterangan saksi, pembelaan terdakwa, serta dinamika psikologis jaksa yang muncul dalam persidangan. Oleh karena itu, keputusan yang diambil terhadap terdakwa harus didasarkan pada prinsip tanggung jawab, keadilan, kecerdasan, profesionalisme, dan objektivitas.

Sistem peradilan di Indonesia berlandaskan Pancasila, yang menekankan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia serta perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Prinsip ini tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, yang mengatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Meskipun sistem hukum tidak selalu mampu mencapai keadilan yang sempurna, hakim tetap

dituntut untuk membuat keputusan yang mendekati prinsip keadilan. Dalam negara demokratis, yang terpenting adalah penyelesaian konflik dilakukan dengan cara yang tampak adil dan mampu menjaga stabilitas sosial. Pada kenyataannya, tidak semua orang akan setuju dengan putusan pengadilan, namun kepercayaan terhadap keadilan sistem peradilan secara keseluruhan harus tetap terjaga. Pengambilan keputusan merupakan proses memilih solusi terbaik di antara berbagai alternatif yang tersedia untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Proses ini melibatkan perumusan berbagai pilihan tindakan guna menghadapi suatu situasi serta menentukan keputusan yang paling tepat demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengambilan keputusan merupakan proses kognitif yang melibatkan beberapa tahap, mulai dari mengidentifikasi masalah, mencari alternatif solusi, mengevaluasi pilihan, hingga menentukan dan memilih alternatif yang paling sesuai. Menurut Nurwandri & Syam (2024), seseorang dianggap telah mengambil keputusan apabila: (a) memulai serangkaian tindakan terhadap sesuatu yang dianggap lebih diinginkan, (b) memutuskan untuk bertindak, atau yang paling umum, (c) menentukan langkah yang akan diambil dalam situasi tertentu setelah mempertimbangkan berbagai alternatif yang tersedia.

Aspek Psikologis Terhadap Pengambilan Keputusan Hakim

Menjadi hakim adalah pekerjaan yang sangat menantang, karena keputusan yang diambil dapat menentukan nasib seseorang apakah mereka akan bebas atau dihukum (Suardi, 2024). Kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, kemerdekaan, kehormatan, dan harta benda yang sangat berharga. Proses persidangan melibatkan berbagai pihak, termasuk pembela, jaksa, saksi, terdakwa, panitera, dan penonton, sehingga terdapat dimensi psikologis yang perlu dipertimbangkan. Dalam konteks ini, ruang sidang bisa dianggap sebagai panggung teater psikologis di mana interaksi dan dinamika antara para pihak sangat memengaruhi hasil.

Peran psikologi dalam hukum menjadi sangat penting, karena hukum pada dasarnya melibatkan manusia sebagai pelaku. Hakim diharapkan dapat menerapkan hukum secara adil dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti keterangan saksi, sikap terdakwa, serta bukti yang diajukan (Lubis & Hasbi, 2023). Namun, dalam praktiknya, hakim terkadang kurang jeli dalam menilai situasi. Misalnya, salah persepsi dalam menilai kejahatan atau kurangnya penggalian data dari saksi bisa memengaruhi keputusan. Selain itu, kesalahan dalam proses penyidikan, seperti pengakuan terdakwa yang tidak sesuai, serta stereotip yang muncul, juga dapat memengaruhi keputusan hakim.

Tugas seorang hakim sejatinya sangat berat, karena di tangannyalah para pencari keadilan menaruh kepercayaan dan harapan mereka. Namun, hakim tetaplah manusia yang tidak dapat sepenuhnya melepaskan sisi kemanusiaannya. Hakim bukanlah malaikat maupun objek tak bernyawa yang mampu menegakkan hukum secara mutlak seperti Dewi Keadilan yang membawa pedang dengan mata tertutup—di mana hukum diterapkan secara mekanis, akurat, dan konsisten tanpa

mempertimbangkan individu yang terlibat. Pada akhirnya, hakim hanyalah manusia biasa yang dapat menunjukkan sisi kemanusiaannya ketika berhadapan dengan pihak-pihak dalam persidangan. Keputusan pengadilan yang menimbulkan kekecewaan bagi pencari keadilan bukanlah hal baru, melainkan sesuatu yang telah terjadi berulang kali sebelumnya, di mana banyak putusan pengadilan justru meninggalkan rasa frustrasi bagi mereka yang mencari keadilan (Rafli, 2023).

Proses penanganan suatu perkara pidana pada akhirnya akan berujung pada putusan hakim. Keputusan tersebut diambil berdasarkan surat dakwaan serta seluruh fakta yang terbukti selama persidangan. Setelah pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk menentukan putusan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalam musyawarah tersebut, setiap anggota majelis hakim mengemukakan pendapatnya, lengkap dengan pertimbangan serta alasan yang mendasarinya.

Pasal berikutnya menyebutkan bahwa musyawarah majelis hakim sebaiknya menghasilkan keputusan yang disepakati secara bulat. Namun, apabila kesepakatan tersebut tidak dapat dicapai meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin, maka terdapat dua alternatif penyelesaian: 1. Putusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak, 2. Jika keputusan melalui suara terbanyak tidak dapat diperoleh, maka pendapat yang paling menguntungkan bagi terdakwa akan digunakan sebagai dasar putusan.

Proses pengambilan keputusan tersebut kemudian dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk tujuan tersebut, dengan isi yang bersifat rahasia (Pasal 182 ayat (7) KUHAP). Sementara itu, putusan hakim harus disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 195 KUHAP, yang menyatakan bahwa suatu putusan hanya dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum jika diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pembacaan putusan dilakukan dengan kehadiran terdakwa, kecuali jika KUHAP atau undang-undang lain mengatur sebaliknya. Misalnya, dalam pemeriksaan cepat, putusan dapat dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa atau perwakilannya, seperti dalam sidang *in absentia* terhadap individu yang tidak dikenal. Namun, hal ini hanya berlaku untuk putusan yang berkaitan dengan perampasan barang yang telah disita. Setelah putusan dibacakan, dokumen putusan tersebut ditandatangani oleh hakim dan panitera.

Analisis psikologi terhadap perilaku hakim dalam pengambilan keputusan sangat penting, mengingat keputusan tersebut memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan menurut (Answow, 2016) yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Kognitif

Hakim menggunakan proses kognitif untuk menganalisis bukti dan argumen yang disampaikan selama persidangan. Pemahaman tentang bias kognitif, seperti bias konfirmasi (mencari informasi yang mendukung keyakinan awal) dan bias afektif (pengaruh emosi terhadap

penilaian), dapat menjelaskan bagaimana hakim mungkin terpengaruh oleh persepsi pribadi mereka, yang dapat mengarah pada keputusan yang tidak objektif.

2. Pengaruh Emosi

Emosi hakim dapat memengaruhi cara mereka memproses informasi dan mengambil keputusan. Misalnya, hakim yang merasa tertekan atau emosional mungkin tidak dapat menilai fakta secara adil. Emosi juga dapat dipicu oleh perilaku para pihak dalam persidangan, termasuk saksi dan terdakwa, yang dapat mempengaruhi reaksi hakim.

3. Peran Pengalaman dan Pendidikan

Pengalaman profesional dan latar belakang pendidikan hakim memainkan peran penting dalam cara mereka mengambil keputusan. Hakim yang lebih berpengalaman mungkin lebih mampu mengatasi tekanan dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki. Pelatihan dalam psikologi dan etika hukum juga dapat membantu hakim dalam memahami aspek psikologis dari kasus yang mereka tangani.

4. Dinamika Sosial dan Lingkungan

Konteks sosial dan budaya di mana persidangan berlangsung dapat mempengaruhi perilaku hakim. Tekanan dari opini publik, media, atau bahkan rekan sejawat dapat memengaruhi keputusan hakim. Dalam beberapa kasus, hakim mungkin merasa tertekan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan harapan masyarakat, yang dapat mengganggu objektivitas mereka.

Implikasi Keputusan Hakim

Keputusan hakim memiliki dampak yang luas dan mendalam, tidak hanya pada individu yang terlibat dalam proses hukum, tetapi juga pada masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasan mengenai dampak tersebut menurut (Isnantiana, 2019) yaitu sebagai berikut:

1. Dampak terhadap Individu

Keputusan hakim dapat secara langsung memengaruhi nasib individu, termasuk terdakwa, korban, dan saksi. Bagi terdakwa, keputusan hakim bisa berarti kebebasan atau penjara, yang dapat mengubah hidup mereka selamanya. Dalam kasus yang melibatkan hukuman berat, keputusan tersebut dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak dasar, stigma sosial, dan dampak psikologis yang berkepanjangan. Bagi korban, keputusan hakim juga memiliki implikasi signifikan, termasuk rasa keadilan atau ketidakadilan yang mungkin mereka rasakan, yang dapat mempengaruhi pemulihan emosional mereka.

2. Dampak terhadap Masyarakat

Keputusan hakim juga memiliki dampak yang lebih luas pada masyarakat. Keputusan yang dianggap adil dan transparan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan hukum. Sebaliknya, keputusan yang dirasa tidak adil dapat menimbulkan rasa frustrasi, kemarahan, dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Hal ini bisa menyebabkan protes, ketidakstabilan sosial, dan bahkan krisis kepercayaan terhadap lembaga hukum. Masyarakat yang melihat bahwa hukum diterapkan secara tidak konsisten atau diskriminatif dapat

kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan, yang dapat mengganggu stabilitas sosial.

3. Dampak terhadap Sistem Hukum

Keputusan hakim juga memiliki implikasi besar bagi sistem hukum secara keseluruhan. Setiap keputusan yang diambil oleh hakim dapat menjadi preseden bagi kasus-kasus di masa depan, mempengaruhi cara hukum ditafsirkan dan diterapkan. Keputusan yang konsisten dan adil dapat membantu membentuk dan memperkuat prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam hukum. Namun, jika keputusan terlihat tidak konsisten atau dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti tekanan publik atau bias pribadi, hal ini dapat merusak integritas dan kredibilitas sistem hukum.

Secara keseluruhan, keputusan hakim memiliki dampak yang sangat luas dan kompleks. Dengan mempertimbangkan implikasi ini, penting bagi hakim untuk mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab, mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga dampak sosial dan psikologis dari keputusan yang mereka buat. Keputusan yang bijaksana dapat membawa keadilan dan stabilitas, sementara keputusan yang tergesa-gesa atau bias dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menciptakan masalah lebih lanjut dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Pengambilan keputusan oleh hakim merupakan proses yang kompleks dan melibatkan tanggung jawab besar terhadap keadilan dan kemanusiaan. Keputusan tersebut harus didasarkan pada analisis mendalam terhadap alat bukti, keterangan saksi, pembelaan terdakwa, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam sistem hukum, meskipun keadilan sempurna sulit dicapai, hakim harus berupaya untuk menghasilkan keputusan yang mendekati keadilan dengan mempertimbangkan aspek kognitif, alternatif yang ada, dan stabilitas sosial. Proses ini menuntut hakim untuk bersikap profesional, objektif, dan mampu mengelola tekanan emosional. Faktor-faktor seperti bias kognitif, tekanan emosional, dan pengaruh opini publik dapat memengaruhi objektivitas hakim, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang aspek psikologis melalui pelatihan khusus. Keputusan hakim memiliki dampak besar pada individu, masyarakat, dan sistem hukum. Keputusan yang adil dan bijaksana dapat mengubah hidup terdakwa, memberi rasa keadilan kepada korban, memperkuat kepercayaan publik, serta menjaga kredibilitas dan integritas sistem peradilan.

REFERENSI

- Afrizal, R. D. (2022). Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Integritas Moral Penegak Hukum. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(01).
- Answow, F. F. (2016). Proses Lahirnya Keputusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri. *Lex Et Societatis*, 4(1).
- Azizah, F. N., Kholifah, N., & Farhani, A. (2023). Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam

- Mewujudkan Penegakan Hukum. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10.
- Choldah, D. (2023). Peran Hakim Dalam Memperkokoh Integritas Peradilan Sebagai Pemenuhan Kepercayaan Publik. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(2), 627–646.
- Eugenia, F., Limanto, C. J., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Tantangan Praktis Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana: Kredibilitas Saksi Dan Validitas Bukti Elektronik. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 492–503.
- Isnantiana, N. I. (2019). Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 19–35.
- Khoiri, A. (2020). Analisis Etika Profesi Hakim Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam. *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 25–43.
- Lubis, A. H., & Hasbi, M. (2023). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan Di Persidangan Perkara Pidana. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12).
- Mulkan, H. (2021). Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(2), 305–319.
- Nurwandri, A., & Syam, N. F. (2024). Aspek Psikologis Dalam Pengambilan Keputusan Hakim. *Al-Mannan: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(1), 16–27.
- Rafli, M. (2023). Etika Profesi Hakim Dalam Melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawab Dalam Penegakan Hukum. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11).
- Salma, S. (2018). Urgensi Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jppi (Jurnal Pendidikan Islam Pendekatan Interdisipliner)*, 2(1), 45–56.
- Siregar, V. A., & Tanjung, A. S. (2024). Persepsi Hakim Pengadilan Tinggi Medan Terhadap Keadilan Dalam Proses Pengambilan Keputusan. *Juris Sinergi Journal*, 1(2), 73–82.
- Suardi, M. D. A. F. (2024). Peran Hakim Dalam Suatu Proses Peradilan Pidana Di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(8), 51–60.
- Syam, M. A., & Lowoleba, K. K. (2023). Etika Dan Profesi Hakim Terhadap Regulasi Penegakan Hukum Di Negara Republik Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5).